

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Identitas Responden

Sejalan dengan pelaksanaan Program Dinas Perhubungan Laut di Kabupaten Rokan Hilir, perlu dilaksanakan pengembangan mulai sari pengadaan fasilitas, pengembangan kualitas sumber daya manusia, penambahan jumlah pegawai yang ahli dan trampil di bidangnya, perumusan kebijakan teknik di bidang pengelolaan Perhubungan Laut, pembinaan, pengelolaan urusan ketatausahaan serta pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan di bidang pengelolaan Perhubungan laut.

Sebelum penulis menganalisa lebih lanjut, perlu kiranya terlebih dahulu mengetahui identitas dari responden. Adapun identitas dari responden tersebut meliputi jenis kelamin, pendidikan dan golongan.

Identitas responden dapat dilihat seperti pada table berikut ini :

Tabel. 5.1 Responden Menurut Jenis Kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	35 orang	88,00
2	Perempuan	5 orang	12,00
Jumlah		40 orang	100,00

Sumber : Kantor Sub Dinas Perhubungan Laut Kabupaten Rokan Hilir
2009

Berdasarkan table di atas, maka terlihat dari 40 orang responden ternyata laki-laki berjumlah 35 orang atau sebesar 88 %, sedangkan perempuan berjumlah 5 orang atau sebesar 12 %.

Dari uraian di atas maka dapat diketahui, ternyata pegawai laki-laki lebih banyak dari pegawai perempuan. Hal ini dapat dimaklumi karena Sub Dinas Perhubungan laut lebih banyak bergerak dan bekerja di bagian lapangan sehingga membutuhkan tenaga yang laki-laki lebih besar terutama di Perhubungan Laut.

Selanjutnya untuk melihat identitas responden melalui tingkat pendidikan formal dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 5.2 Distribusi Responden Menurut Pendidikan Formal

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Sarjana	2 orang	5,00
2	D-3	5 orang	12,00
3	SLTA	28 orang	70,00
4	SLTP	5 orang	12,00
Jumlah		40 orang	100,00

Sumber : Kantor sub Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir 2009

Berdasarkan tabel di atas, maka terlihat dari 40 orang responden, 2 orang atau sebesar 5% berpendidikan Sarjana, 5 orang atau sebesar 12% berpendidikan D-3, 28 orang atau sebesar 70% berpendidikan SLTA, dan 5 orang atau sebesar 12 % berpendidikan SLTP.

Dilihat dari tingkat pendidikan responden, terlihat bahwa sejumlah 28 orang atau sebesar 70 % berpendidikan SLTA. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan belum dapat dikatakan baik, hal ini mengacu pada beban tugas pegawai sub Dinas Perhubungan Laut yang semakin banyak penuh keseriusan dan tanggung jawab. Untuk tingkat pendidikan pegawai haruslah memiliki latar belakang pendidikan yang cukup baik, hal ini dapat memberikan kemungkinan terhadap tingkat pengetahuan yang baik, di dalam mencapai tujuan pekerjaan yang akan menjadi tanggung jawabnya.

Selain dilihat dari tingkat pendidikan formal pegawai yang cukup baik, tingkat pendidikan non formal juga (Diklat) akan dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan yang lebih baik dalam menjalankan tugasnya.

Untuk dapat melihat lebih lanjut mengenai tingkat pendidikan non formal (Diklat) responden dapat dilihat dari table berikut ini :

**Tabel 5.3 Distribusi Responden Menurut Pendidikan Non Formal
(Diklat) Pada Tahun 2009**

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Diklat	13 orang	33,00
2	Belum Diklat	27 orang	67,00
Jumlah		40 orang	100,00

Sumber : Kantor Sub Dinas Perhubungan Laut Kabupaten Rokan Hilir
2009

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa 27 orang atau sebesar 67% pegawai pada sub Dinas Perhubungan belum mengikuti Diklat, dan 13 orang atau sebesar 33% telah mengikuti diklat.

Sebagai Dinas yang baru berdiri awal tahun 2000 sehingga mengakibatkan sedikitnya pegawai yang mengikuti diklat. Hal ini juga tidak terlepas dari dana itu sendiri. Sehingga dalam pelaksanaan program Dinas Perhubungan akan mengalami penurunan.

Selanjutnya selain tingkat pendidikan baik formal maupun non formal, perlu juga diketahui kepangkatan atau golongan dari responden yang dimaksud agar dapat dijadikan sebagai langkah atau pedoman serta arah bagi pegawai itu sendiri untuk melaksanakan program Dinas Perhubungan agar pegawai yang benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan dalam organisasi. Hal ini untuk menghadapi serta mengantisipasi penunjukkan kerja yang sesuai antara pangkat dan golongan sehingga pelaksanaan program Dinas Perhubungan dapat berjalan dengan apa yang diinginkan organisasi.

Untuk melihat golongan atau kepangkatan dari responden dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.4. Distribusi Responden Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Tingkat Golongan	Jumlah	Persentase (%)
1	Golongan I	5 orang	13,00
2	Golongan II	27 orang	67,00
3	Golongan III	7 orang	18,00
4	Golongan IV	1 orang	2,00
Jumlah		40 orang	100,00

Sumber : kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir 2009

Dari tabel di atas dapat diketahui, pegawai yang mempunyai golongan I sebanyak 5 orang atau sebesar 13%, Golongan II sebanyak 27 orang atau sebesar 67%, Golongan III sebanyak 7 orang atau sebesar 18%, golongan IV sebanyak 1 orang atau sebesar 2%.

Dari uraian di atas pegawai yang bergolongan II ternyata paling banyak dari 40 responden, yaitu 27 orang atau sebesar 67%. Melihat keadaan tersebut sangat diperlukan kiranya pengembangan pegawai, hal ini berhubungan dengan upaya pelaksanaan program Dinsa Perhubungan Laut agar dalam menjalankan tugas organisasi lebih menghasilkan kerja yang lebih optimal.

5.2 Strategi Pengembangan Sub Dinas Perhubungan Laut Dalam Rangka Otonomi Daerah di Kabupaten Rokan Hilir

Dalam menghadapi persoalan pelaksanaan program Dinas Perhubungan dalam pengembangan Sub Dinas Perhubungan Laut Kabupaten Rokan Hilir menggerakkan seluruh komponen lain yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Upaya yang dilakukan antara lain :

5.2.1. Pengembangan Fasilitas Sub Dinas Perhubungan Laut

Pemerataan pembangunan antar wilayah Kecamatan dan Desa serta mengembangkan wilayah di Kabupaten Rokan Hilir dipengaruhi oleh sarana dan prasarana yang ada. Selama ini pembangunan fasilitas diupayakan untuk dapat menjangkau ke berbagai pelosok pedesaan, namun hasilnya belum optimal karena keterbatasan dana pemerintah dan luasnya wilayah yang harus dijangkau, khusus di bidang Perhubungan Laut Pemerintah memerlukan dana yang cukup besar agar dapat membangun dermaga yang baik untuk keperluan transportasi ataupun keperluan bisnis.

Pembangunan fasilitas Perhubungan Laut merupakan salah satu bagian yang penting dalam Pembangunan Daerah. Fasilitas berperan sebagai pendukung kegiatan yang akan dilaksanakan, baik bagi masyarakat maupun Pemerintah daerah khususnya Sub Dinas Perhubungan Laut yang berfungsi untuk menyediakan jasa pelayanan terhadap masyarakat. Pemanfaatan Fasilitas Perhubungan

Laut sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan produksi dan distribusi barang maupun jasa.

Untuk dapat melihat pentingnya keadaan fasilitas Sub Dinas Perhubungan Laut dalam melakukan pengembangan terlebih dulu melihat keadaan fasilitas yang dimiliki Sub Dinas Perhubungan Laut Kabupaten rokan Hilir adalah seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 5.2.1. Distribusi Responden Berdasarkan Keadaan Fasilitas Pada Kantor Sub Dinas Perhubungan Laut Kabupaten Rokan Hilir.

No	Kriteria	Frekuensi	Persentase (%)
1	Memadai	13	33,00
2	Kurang memadai	16	40,00
3	Tidak memadai	11	27,00
Jumlah		40	100,00

Sumber : Data Lapangan Tahun 2009

Dari tabel di atas, responden yang mengatakan fasilitas Sub Dinas Perhubungan memadai 13 orang 33%. Sedangkan kurang memadai berjumlah 16 orang atau sebesar 40%. Dan yang mengatakan tidak memadai berjumlah 11 orang atau sebesar 27%.

Sangat wajar bila responden mengatakan tidak memadai terhadap keadaan fasilitas Sub Dinas Perhubungan Laut. Hal ini dapat dirasakan dengan masih kurangnya jumlah speedboat dalam menunjang aktivitas kerja di laut.

Seperti yang dikatakan Kepala, Sub Kepala Bagian beserta Pegawai Dinas Perhubungan dalam wawancara yang dilakukan penulis bahwa sampai saat ini fasilitas Sub Dinas Perhubungan Laut yang telah ada di bagai Siapi-api Kabupaten rokan Hilir hanya berupa 1 buah Speedboat dan masih belum mencukupi untuk melakukan pengembangan di Sub Dinas Perhubungan Laut.

5.2.2. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Sub Dinas Perhubungan Laut Kabupaten Rokan Hilir

Dari hasil wawancara penulis dengna Kepala, dan Sub Kepala Bagian beserta pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten rokan Hilir, dalam upaya pengembangan sumber daya Manusia (SDM) sub Dinas Perhubungan Laut Kabupaten Rokan Hilir, lebih memperhatikan tentang bagaimana manusianya itu sendiri, maksudnya adanya kemauan sari pegawai Sub Dinas Perhubungan Laut tersebut untuk sama-sama berusaha untuk meningkatkan kemampuan mereka masing-masing menurut bidangnya sehingga nantinya agar terbentuk sumber daya manusia yang profesional di bidangnya.

Untuk mencapai sasaran dalam mengembangkan Sub Dinas Perhubungan Laut Kabupaten Rokan Hilir, Sub Dinas Perhubungan Laut melaksanakan pembenahan baik pada aspek kelembagaan maupun kualitas pegawai Sub Dinas Perhubungan Laut itu sendiri. Kesempatan Mengikuti diklat.

Untuk dapat melihat sejauh mana pelaksanaan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia Sub Dinas Perhubungan Laut Kabupaten Rokan Hilir yang mempunyai kesempatan mengikuti Diklat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.2.2. Distribusi Responden Berdasarkan Kesempatan Mengikuti Diklat Pada Kantor Sub Dinas Perhubungan Laut Kabupaten Rokan Hilir.

No	Kriteria	frekwensi	Persentase (%)
1	Terlaksana	12	30,00
2	Kurang Terlaksana	17	43,00
3	Tidak Terlaksana	11	27,00
Jumlah		40	100,00

Sumber : Data Lapangan Tahun 2009

Dari tabel di atas terlihat bahwa, responden yang mengatakan kesempatan mengikuti Diklat yang mengatakan terlaksana berjumlah 12 orang atau sebesar 30%. Kurang terlaksana berjumlah 17 orang atau sebesar 43%. Dan yang mengatakan tidak terlaksana berjumlah 11 orang atau sebesar 27%.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesempatan mengikuti Diklat dalam pengembangan Sub Perhubungan Laut kurang terlaksana, ini wajar karena keterbatasan dana dari Dinas Perhubungan. Ini diakibatkan juga karena banyaknya pegawai honorer dan banyaknya pegawai yang belum mengikuti Diklat.

5.2.3. Penambahan Jumlah Pegawai Pada Sub dinas Perhubungan Laut Kabupaten Rokan Hilir.

Sub Dinas Perhubungan Laut Kabupaten Rokan Hilir seperti yang telah dijelaskan terdahulu mempunyai masalah dengan kurangnya jumlah pegawai yang ada. Ini mengakibatkan kurang lancarnya kegiatan pelaksanaan tugas sehari-hari di Sub Dinas Perhubungan Laut Kabupaten Rokan Hilir.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah telah berusaha dengan menambah jumlah pegawai pada Sub Dinas Perhubungan laut baik dengan mengambil dari pegawai propinsi maupun dengan mempekerjakan pegawai honorer. Pegawai honorer tersebut, apabila kinerjanya bagus tidak mustahil akan diusulkan sebagai pegawai pada Sub Dinas Perhubungan Laut. Jumlah Pegawai yang dibutuhkan oleh Sub Dinas Perhubungan laut tiap tahunnya mencapai 3 orang karena masih adanya jabatan yang kosong terutama untuk tenaga yang ahli dan profesional di bidang perkapalan.

Dengan adanya bantuan tenaga honorer ini sedikit banyak dinas telah terbantu dalam hal pelaksanaan tugasnya. Untuk mengatasi adanya jabatan structural yang rangkap karena kekurangan pegawai maka jabatan tersebut diisi dengan mengambil pegawai propinsi yang memenuhi syarat untuk jabatan tersebut.

Penambahan pegawai ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja Sub Dinas Perhubungan Laut Kabupaten

Rokan Hilir yang masih mengalami kekurangan pegawai yang profesional di bidangnya, maka akan sulit untuk dapat bekerja secara optimal.

Dengan memperhatikan kebutuhan kuantitatif maupun kualitatif pegawai Sub Dinas Perhubungan dalam menerima pegawai yang ahli dan terampil di bidangnya terutama di bidang Perhubungan Laut sangat besar pengaruhnya terhadap pengembangan Sub Dinas Perhubungan Laut itu sendiri.

Untuk dapat melihat sejauh mana kebutuhan pegawai baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif oleh Sub Dinas Perhubungan Laut Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.2.3. Distribusi Responden Berdasarkan Penambahan Pegawai Pada Kantor Sub Dinas Perhubungan Laut Kabupaten Rokan Hilir

No	Kriteria	Frekwensi	Persentase (%)
1	Tercapai	13	33,00
2	Kurang Tercapai	15	37,00
3	Tidak Tercapai	12	30,00
Jumlah		40	100,00

Sumber : Data Lapangan Tahun 2009

Dari tabel di atas terlihat bahwa, sebanyak 13 orang atau sebesar 33% mengatakan tercapai. 15 orang atau sebesar 37%

mengatakan kurang tercapai. Dan yang mengatakan tidak tercapai berjumlah 12 orang atau sebesar 30%.

5.2.4. Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengelolaan perhubungan Laut.

Dalam melakukan pengembangan di Sub Dinas Perhubungan Laut, hendaknya Sub Dinas Perhubungan Laut harus benar-benar memperhatikan dalam merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan laut dengan cara melakukan koordinasi dengan bidang instansi terkait melalui turun langsung ke lapangan untuk mengetahui gambaran langsung yang lebih jelas.

Untuk dapat melihat sejauh mana Sub Dinas Perhubungan Laut dalam merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan perhubungan laut, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.2.4. Distribusi Responden Berdasarkan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengelolaan Perhubungan Laut Pada Kantor Sub Dinas Perhubungan Laut Kabupaten Rokan Hilir.

No	Kriteria	Frekwensi	Persentase (%)
1	Terlaksana	12	30,00
2	Kurang terlaksana	18	45,00
3	Tidak telaksana	10	25,00
Jumlah		40	100,00

Sumber : Data Lapangan Tahun 2009

Dari tabel di atas terlihat bahwa, yang menyatakan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan perhubungan laut terlaksana sebanyak 12 orang atau sebesar 30%. 18 orang atau sebesar 45% mengatakan kurang terlaksana. Dan yang mengatakan tidak terlaksana berjumlah 10 orang atau sebesar 25%.

5.2.5. Pembinaan Terhadap Sub Dinas Perhubungan Laut Kabupaten Rokan Hilir.

Untuk melakukan pembinaan terhadap dirinya sendiri, Sub Dinas Perhubungan Laut harus selalu berusaha meningkatkan keterampilan, keahlian dan kegairahan kerja dari pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

Untuk dapat melihat pembinaan yang dilakukan Sub Dinas Perhubungan Laut dalam melaksanakan program Dinas Perhubungan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.2.5. Distribusi responden Berdasarkan Pembinaan Terhadap Sub Dinas Perhubungan Laut Pada Kantor Sub Dinas Perhubungan Laut Kabupaten Rokan Hilir.

No	Kriteria	Frekwensi	Persentase (%)
1	Terlaksana	11	27,00
2	Kurang terlaksana	19	48,00
3	Tidak terlaksana	10	25,00
Jumlah		40	100,00

Sumber : Data Lapangan Tahun 2009

Dari tabel di atas terlihat bahwa, responden yang mengatakan pembinaan terlaksana berjumlah 11 orang atau sebesar 27%. Kurang terlaksana berjumlah 19 orang atau sebesar 48%. Dan yang mengatakan tidak terlaksana berjumlah 10 orang atau sebesar 25%.

5.2.6. Pengelolaan Urusan Ketatausahaan Sub Dinas Perhubungan Laut Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam melakukan pengembangan hendaknya Sub Dinas Perhubungan Laut harus memperhatikan pengelolaan urusan ketatausahaan dengan cara memperhatikan pengelolaan retribusi, perhitungan hasil retribusi dan pencatatan hasil retribusi di perhubungan laut.

Untuk dapat melihat kegiatan yang dilakukan Sub Dinas Perhubungan Laut dalam pengelolaan pemungutan retribusi perhubungan laut, perhitungan retribusi dan pencatatan hasil retribusi perhubungan laut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.2.6. Distribusi Responden Berdasarkan Pengelolaan Urusan Ketata Usahaan Pada Kantor Sub Dinas Perhubungan Laut Kabupaten Rokan Hilir.

No	Kriteria	Frekwensi	Persentase (%)
1	Terlaksana	14	35,00
2	Kurang Terlaksana	15	37,00
3	Tidak Terlaksana	11	27,00
Jumlah		40	100,00

Sumber : Data Lapangan Tahun 2009

Dari tabel di atas terlihat bahwa, responden yang mengatakan pengelolaan urusan ketata usahaan terlaksana berjumlah 14 orang atau sebesar 35%. Kurang terlaksana berjumlah 15 orang atau sebesar 37%. Dan yang mengatakan tidak terlaksana berjumlah 11 orang atau sebesar 27%.

5.2.7. Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan di Bidang Pengelolaan Perhubungan Laut Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan di bidang pengelolaan perhubungan laut. Sub Dinas Perhubungan Laut harus memberikan pelayanan dan pengarahan dan pengelolaan perhubungan laut, sehingga target yang direncanakan dapat terealisasi.

Untuk dapat melihat sejauh mana Sub Dinas Perhubungan Laut dalam memberikan perijinan dan pelaksanaan pelayanan di bidang perhubungan laut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.2.7. Distribusi Responden Berdasarkan Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Di Bidang Pengelolaan Perhubungan Laut Pada Kantor sub Dinas Perhubungan Laut Kabupaten Rokan Hilir.

No	Kriteria	Frekwensi	Persentase (%)
1	Terlaksana	10	25,00
2	Kurang Terlaksana	22	55,00
3	Tidak Terlaksana	8	20,00

Jumlah	40	100,00
--------	----	--------

Sumber : Data Lapangan Tahun 2009

Dari tabel di atas terlihat bahwa, responden yang mengatakan pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan terlaksana berjumlah 10 orang atau sebesar 25%. Kurang terlaksana berjumlah 22 orang atau sebesar 55%. Dan yang mengatakan tidak terlaksana berjumlah 8 orang atau sebesar 20%.

Setelah membahas masing-masing pelaksanaan program Dinas Perhubungan dalam pengembangan Sub Dinas Perhubungan Laut, maka dapat diperoleh rekapitulasi jawaban responden tentang pelaksanaan program Dinas Perhubungan dalam pengembangan Sub Dinas Perhubungan Laut di Kabupaten Rokan Hilir. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.2.8. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Strategi Pengembangan Sub Dinas Perhubungan Laut Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Kabupaten Rokan Hilir.

No	Pelaksanaan Program Dinas Perhubungan dalam Pengembangan Sub Dinas Perhubungan Laut	Tanggapan Responden (Persentase %)			Jumlah (Persentase %)
		Terlaksana	Kurang Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Pengembangan Fasilitas	13 (33%)	16 (40%)	11 (27%)	40 (100%)
2	Pengembangan Kualitas SDM	12 (30%)	17 (43%)	11 (27%)	40 (100%)
3	Penambahan Jumlah Pegawai	13 (33%)	15 (37%)	12 (30%)	40 (100%)
4	Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Pengelolaan Perhubungan Laut	12 (30%)	18 (45%)	10 (25%)	40 (100%)
5	Pembinaan Terhadap Sub Dinas Perhubungan Laut	11 (27%)	19 (48%)	10 (25%)	40 (100%)
6	Pengelolaan Urusan Ketatausahaan Sub Dinas Perhubungan Laut	14 (35%)	15 (37%)	11 (27%)	40 (100%)
7	Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Perhubungan Laut	10 (25%)	22 (55%)	8 (20%)	40 (100%)
Jumlah		85	122	73	280
Rata-rata		12	17	11	40
Persentase		30%	43%	27%	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2009

Berdasarkan tabel III.12 di atas dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan program dinas Perhubungan dalam pengembangan sub Dinas Perhubungan Laut di Kabupaten Rokan Hilir di mana 30%

responden mengatakan “Terlaksana” dan 43% responden mengatakan “Kurang Terlaksana”, sedangkan 27% responden mengatakan “Tidak terlaksana”.

Wajar bila responden menngatkan kurang terlaksana kaarena disebabkan kurangnya fasilitas Sub Dinas Perhubungan Laut, kurangnya pegawai yang ahli terampil dan professional di bidang kelautann kemudian ditambah dengan kurangnya pendidikan non formal Pegawai pada Sub Dinas Perhubungan Laut.

5.3. Faktor Penghambat Pelaksanaan Strategi Pengembangan Sub Dinas Perhubungan Laut Dalam Rangka Otonomi daerah Di Kabupaten Rokan Hilir.

Dari dokumentasi dan wawancara serta kuisisioner yang dilakukan penulis dengan Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Tata Usaha Dinas Perhubungan, Kepala Sub Dinas Perhubungan, seksi Lalu Lintas Angkutan Laut Sub Dinas Perhubungan Laut, Seksi Pelabuhan Sub Dinas Perhubungan Laut, Seksi Keselamatan Pelayaran Sub Dinas Perhubungan Laut, dan Seksi Lalu Lintas angkutan Sungai Danau Sub Dinas Perhubungan Laut dan Pegawai serta Tenaga honor. Pelaksanaan program Dinas Perhubungan Laut mempunyai factor penghambatnya. Pemerintah harus mampu mengatasi segala faktor yang menjadi penghambat dalam pengembangan Sub Dinas Perhubungan Laut.

Pelaksanaan program Dinas perhubungan laut dalam pengembangan Sub Dinas Perhubungan Laut tidak lepas dari berbagai

macam hambatan yang harus dapat diatasi, sedapat mungkin tidak berdampak buruk bagi kinerja Pegawai Sub Dinas Perhubungan Laut di Kabupaten Rokan Hilir.

5.3.1. Kurangnya Fasilitas Sub Dinas Perhubungan Laut

Menyangkut diperlukan fasilitas yang benar-benar menunjang segala kegiatan sub Dinas Perhubungan Laut Kabupaten Rokan Hilir. Dari hasil pengamatan, penulis melihat bahwa fasilitas yang dimiliki oleh Sub Dinas Perhubungan Laut Kabupaten Rokan Hilir belum begitu memadai terutama speedboat guna mengontrol aktivitas laut. Seharusnya Sub Dinas Perhubungan Laut memiliki lebih banyak lagi speedboat. Sub Dinas Perhubungan Laut Kabupaten Rokan Hilir sampai saat ini masih memiliki 1 speedboat, padahal sudah sering diusulkan oleh Dinas Perhubungan kepada Pemerintah. Pemerintah Rokan Hilir pada saat ini sedang berupaya mempersiapkan segala fasilitas yang diperlukan untuk dapat menunjang kegiatan dalam pengembangan sector Perhubungan Laut yang cukup menjanjikan.

Untuk dapat melihat pentingnya keadaan fasilitas Sub Dinas Perhubungan Laut dalam melakukan upaya pengembangan di Sub Dinas Perhubungan Laut adalah seperti tabel berikut ini :

Tabel 5.3.1. Distribusi Responden Berdasarkan Keadaan Fasilitas Sub Dinas Perhubungan Laut Kabupaten rokan Hilir.

No	Kriteria	Frekuensi	Persentase (%)
1	Memadai	13	33,00
2	Kurang memadai	16	40,00
3	Tidak memadai	11	27,00
Jumlah		40	100,00

Sumber : Data Lapangan Tahun 2009.

Dari tabel di atas, responden yang mengatakan fasilitas Sub Dinas Perhubungan memadai 13 orang 33%. Sedangkan kurang memadai berjumlah 16 orang atau sebesar 40%. Dan yang mengatakan tidak memadai berjumlah 11 orang atau sebesar 27%.

Sangat wajar bila responden mengatakan tidak memadai terhadap keadaan fasilitas yang tersedia di Kantor Sub Dinas Perhubungan Laut. Hal ini dapat dirasakan dengan keberadaan peralatan yang tidak cukup menunjang aktivitas kerja. Begitu juga aktivitas kerja pelabuhan tidak tersedia speedboat yang memadai.

Kebutuhan fasilitas yang akan dipenuhi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang dikatakan Kepala Dinas Perhubungan antara lain :

1. Pembuatan pos di Pelabuhan bagan Siapi-api Kabupaten rokan Hilir
2. Alat Transportasi laut berupa 2 speedboat.

5.3.2. Kurangnya Pegawai Pada Sub Dinas Perhubungan Laut Kabupaten Rokan Hilir.

Sub Dinas Perhubungan Laut Kabupaten Rokan Hilir sejak awal berdiri tahun 2000 mengalami kekurangan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kurangnya pegawai ini merupakan suatu masalah yang dihadapi Sub Dinas Perhubungan Laut Kabupaten Rokan Hilir dalam pengembangan dirinya sendiri karena dalam pengawasan Perhubungan Laut dan pengaturannya diperlukan jumlah pegawai yang cukup memadai dan proporsional seimbang dengan banyak dan luasnya daerah yang menjadi wewenang dinas Perhubungan khususnya Sub Dinas Perhubungan Laut Kabupaten Rokan Hilir. Hal ini menjadi suatu faktor penghambat dalam pengembangan Sub Dinas Perhubungan Laut karena kurangnya tenaga kerja.

Untuk dapat melihat hambatan dalam upaya penambahan pegawai Sub Dinas Perhubungan Laut Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.3.2. Distribusi Responden Berdasarkan Penambahan Pegawai Pada Kantor Sub Dinas Perhubungan Laut Kabupaten Rokan Hilir

No	Kriteria	Frekwensi	Persentase (%)
1	Tercapai	13	33,00
2	Kurang Tercapai	15	37,00
3	Tidak Tercapai	12	30,00
Jumlah		40	100,00

Sumber : Data Lapangan Tahun 2009

Dari tabel di atas terlihat bahwa, sebanyak 13 orang atau sebesar 33% mengatakan tercapai. 15 orang atau sebesar 37% mengatakan kurang tercapai. Dan yang mengatakan tidak tercapai berjumlah 12 orang atau sebesar 30%.

Berdasarkan tabel di atas kurangnya pegawai pada sub Dinas Perhubungan Laut memang dinilai kurang tercapai, hal ini disebabkan factor keterbatasan dana dan kurangnya pelamar pegawai yang ahli dan terampil di bidangnya terutama di bidang perkapalan. Namun hingga saat ini hanya terbatas rencana Sub Dinas Perhubungan laut akan menambah jumlah pegawainya terutama yang ahli dan terampil di bidangnya terutama bidang perkapalan. Sehingga dengan demikian hambatan dalam pengembangan Sub Dinas Perhubungan laut bisa diatasi.

5.3.3. Pendidikan Non Formal (Diklat)

Untuk dapat mengatasi pendidikan non formal pegawai perlu dilakukan upaya dalam meningkatkan kerja organisasi dalam upaya pengembangan Sub Dinas Perhubungan Laut. Hal ini dapat tercapai apabila Sub Dinas Perhubungan Laut terus mengalokasikan dana yang lebih besar dan memberi kesempatan bagi pegawai yang ingin mengikuti Diklat.

Untuk dapat melihat hambatan dalam pengembangan Sub Dinsa Perhubungan Laut di Kabupaten Rokan Hilir ditinjau dari segi pendidikan non formal dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.3.3. Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Non Formal Pada Kantor Sub Dinas Perhubungan Laut Kabupaten Rokan Hilir.

No	Kriteria	frekwensi	Persentase (%)
1	Terlaksana	12	30,00
2	Kurang Terlaksana	17	43,00
3	Tidak Terlaksana	11	27,00
Jumlah		40	100,00

Sumber : Data Lapangan Tahun 2009

Dari tabel di atas terlihat bahwa, sebanyak 12 orang responden atau sebesar 30% mengatakan terlaksana. Kurang terlaksana berjumlah 17 orang atau sebesar 43%. Dan yang mengatakan tidak terlaksana berjumlah 11 orang atau sebesar 27%.

Berdasarkan tabel di atas bahwa tingkat pendidikan non formal pegawai dalam pengembangan Sub Dinas Perhubungan Laut memang dinilai kurang terlaksana, hal ini disebabkan oleh faktor keterbatasan dana dan kesempatan pegawai mengikuti Diklat.

Sehingga untuk pelaksanaan program pengembangan Sub Dinas Perhubungan laut belum sepenuhnya terlaksana. Namun hingga saat ini dinas Pemerintah terus melakukan upaya kepada Pemerintah Daerah untuk menambah anggaran satuan kerja Sub Dinas Perhubungan laut agar setiap pegawai memiliki keterampilan dan keahlian. Begitu juga dengan fasilitas Sub Dinas Perhubungan Laut terus meminta penambahan fasilitas terutama alat berupa speedboat. Dan Sub Dinas Perhubungan terus berupaya kepada Pemerintah untuk melakukan pengembangan di Sub Dinas Perhubungan Laut Kabupaten Rokan Hilir.

